

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Tinjauan Pustaka	6
5.1 Konsep Negara Kesatuan	6
5.2 Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	7
5.3 Konsep Negara Hukum	9
5.4 Konsep Pembagian Kekuasaan Negara.....	10

5.5 Konsep Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	10
6. Metode Penelitian.....	12
6.1 Tipe Penelitian	12
6.2 Pendekatan Masalah.....	12
6.3 Bahan Hukum.....	13
6.4 Analisis Bahan Hukum	14

BAB II KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH SEBAGAI PENGAWASAN PREVENTIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015

15

1. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Peraturan Perundang-undangan	15
1.1 Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Menurut Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia	16
1.2 Kedudukan Perda Menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan	21
1.3 Kedudukan Perda Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24
1.4 Kedudukan Perda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	27

2. Harmonisasi Peraturan Daerah Sebagai Bentuk Pengawasan Preventif	39
3. Bentuk Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah.....	45
3.1 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.....	46
3.2 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	49
3.3 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	53
3.4 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	58
 BAB III KONSEKUENSI HUKUM BAGI DAERAH JIKA MEMBERLAKUKAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK HARMONIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015	 73
1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Mojokerto	73
2. Bentuk Sanksi Bagi Daerah Terkait Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....	104
2.1 Sanksi bagi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	104
2.2 Sanksi bagi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	107

2.3 Sanksi bagi Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	109
BAB IV PENUTUP	114
1. Kesimpulan	114
2. Saran.....	115
DAFTAR BACAAN	